

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan suatu keniscayaan. Semua aktivitas lembaga baik swasta maupun publik dituntut akuntabel dan transparan. Kehidupan keagamaan seakan-akan menjadi dimensi lain yang tidak memerlukan akuntabilitas dan transparansi secara langsung dalam bentuk pelaporan akuntansi. Praktek akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi di entitas keagamaan khususnya Islam, melalui Masjid jarang sekali menjadi perhatian khusus dalam praktik dan kajian ilmiah. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi unik dan penting untuk menemukan dan mengenali praktik akuntansi serta pengelolaan keuangan di Masjid, sehingga penelitian ini akan menjawab suatu pertanyaan : bagaimana praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh para pengurus Masjid? (Simanjuntak, dkk, 2011)

Firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah 282:

“ Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan.”

“Penggalan Surat Al Baqarah 282 tersebut diatas memberikan pesan bahwa Islam mendorong praktek akuntansi dalam kehidupan bermuamalah (perdagangan). Pada dasarnya, praktek akuntansi dan ilmu akuntansi di lingkungan bisnis (muamalah) telah menjadi bagian yang integral. Akan tetapi, ilmu akuntansi dan prakteknya di luar entitas bisnis khususnya lembaga keagamaan sangat termarginalkan. Sebagai entitas pelapor akuntansi yang menggunakan dana masyarakat (publik) sebagai sumber keuangannya dalam bentuk sedekah, sumbangan atau bentuk bantuan sosial lainnya yang berasal dari masyarakat (publik), Masjid menjadi bagian dari entitas publik yang semua kegiatannya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Akuntabilitas dan transparansi menjadi kata kunci yang sangat penting bagi entitas publik untuk bertahan dan memaksimalkan perannya pada kehidupan sosial budaya dimana entitas tersebut berada dan berbeda dengan entitas publik yang lainnya” (Simanjuntak, dkk, 2011)

Menurut Randa (2011), akuntabilitas bagi setiap organisasi baik organisasi publik maupun organisasi tertutup yang sifatnya non pemerintah termasuk organisasi Gereja sangat dibutuhkan karena setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal maupun eksternal organisasi. Gray et al (2006), mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan hak masyarakat atau kumpulan dalam masyarakat yang timbul oleh adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pada sisi yang berbeda akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman, 2005).

Namun pada praktiknya di Non Government Organization (NGO) masih sangat lemah (Fries, 2003 dan Brown & Moore, 2001). Organisasi Gereja pada umumnya, khususnya pada Gereja Katolik sebagai salah satu organisasi publik non pemerintah dalam bidang keagamaan, juga tidak lepas dari berbagai kritik, saran dan tuntutan agar Gereja terbuka dan melaksanakan praktik akuntabilitas dengan pertanggungjawaban. Selama ini organisasi Gereja Katolik dianggap tertutup dan tidak transparan terhadap praktik akuntansi modern (Randa, 2011). Menurut Berry (2005), organisasi keagamaan Gereja resisten terhadap praktik akuntabilitas karena besarnya pengaruh para pemimpin organisasi dan tradisi yang ada di Gereja. Kondisi tersebut menimbulkan kasus-kasus penyelewengan pada Gereja Katolik tidak banyak yang mengetahui dan cenderung ditutup agar tidak menjadi konsumsi bagi publik.

Hasil penelitian Saerang (2001) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam organisasi Gereja meliputi aspek spiritual, sosial, dan keuangan oleh para anggota jemaat dan pimpinan gereja lewat perilaku mereka setiap hari. Aspek spiritual dan sosial memberikan perbedaan tersendiri terhadap konsep akuntabilitas Gereja sebagai organisasi keagamaan yang sarat akan unsur teologis. Penelitian akuntansi Gereja telah banyak dilakukan karena organisasi gereja berkembang dengan pesat serta memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda-beda.

Menurut Kurniasari (2011), masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba (*non-profit oriented*). masjid sebagai sarana peribadatan

dan kegiatan umat tentunya memerlukan sistem pelaporan keuangan yang afektif. Hal ini dikarenakan masjid juga memerlukan informasi yang dapat menunjang kegiatan peribadatan, kegiatan keagamaan, termasuk aktivitas perawatan dan pemeliharaan masjid. Selain itu, para pengelola masjid (takmir) juga memerlukan sistem pelaporan keuangan masjid yang akurat khususnya yang berhubungan dengan :

1. Keadaan dan kondisi jamaah
2. Keadaan dan kondisi harta kekayaan dan keuangan masjid
3. Informasi lain yang diperlukan sehubungan dengan kepentingan masjid.

Hal ini bertujuan untuk pertanggungjawaban kepada para pengurus dan jamaah masjid. Pengelolaan keuangan masjid yang baik, juga merupakan salah satu faktor utama dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid. Hal ini dikarenakan, masjid juga memerlukan ketersediaan dana yang tidak sedikit setiap bulannya. Dana-dana tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peribadatan, keagamaan, pengadaan sarana dan prasarana, dan pengembangan masjid. Ini merupakan tanggung jawab para pengurus masjid (takmir) untuk memikirkan, mencari, dan mengumpulkan dana untuk kepentingan masjid.

Populasi masjid dan umat muslim di Indonesia sangat banyak. Kepastian dana mengalir pun selalu ada. Namun, seringkali takmir masjid sebagai pengelola tidak mengetahui persis gambaran pengalokasian dana. Bisa jadi dianggap, kalau ada kegiatan, uang datang cepat. Uang yang ada

dialokasikan untuk kegiatan. Tapi, tidak ada gambaran sejak awal mau dikelola seperti apa uang itu. Oleh karena itu, harus ada alternatif agar pengelolaan keuangan masjid bisa berjalan efektif yaitu melalui proses identifikasi aktivitas, sumber-sumber penerimaan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan anggaran berdasarkan aktivitas (Kurniasari, 2011).

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian tentang keuangan Masjid. Maka penelitian ini berjudul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus di Masjid Jami' Raudlatul Falah Desa Sekuro Kec.Mlonggo Kab.Jepara). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya oleh (Simanjuntak, dkk, 2011) yang berjudul Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian Simanjuntak dan Januarsih terletak pada objek yang diteliti pada Masjid, akan tetapi yang membedakannya terletak pada study kasusnya. Penelitian ini di lakukan di desa sekuro karena Desa Sekuro merupakan salah satu desa yang mengedepankan pembangunan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diambil dari Balaidesa Sekuro bahwa misi desa sekuro dalam membangun desa, diantaranya melalui pemberdayaan potensi sumber daya alam yang ada dan sumber daya manusia untuk membangun sarana dan prasarana yang ada di Desa Sekuro, salah satunya adalah dengan membangun Masjid. Pembangunan tersebut merupakan antusias msyarakat yang berlandaskan pada visi “bermoral dalam bersikap, santun dan ikhlas dalam bekerja menuju desa sekuro damai dan sejahtera”, yang disertai dengan

prinsip atau motto atas dasar kebersamaan, kepercayaan, kejujuran, kreativitas, kegigihan dan kualitas. Hal ini di dapat dalam wujud pelaporan kegiatan yang ada, salah satunya adalah laporan keuangan masjid. Maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas dan pengelolaan keuangan di masjid tersebut, sehingga alasan pemilihan objek dalam penelitian ini yaitu Masjid Jami' Raudlatul Falah yang merupakan Masjid terbesar di Desa Sekuro Kec.Mlonggo Kab.Jepara. Peneliti mengharapksan Masjid menemukan model akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masjid sebagai entitas masyarakat (publik) sehingga mempermudah dalam pengelolaannya.

1.2. Ruang Lingkup

- a. Penelitian ini menempatkan peneliti dalam internal Masjid
- b. Penelitian ini menganalisis tentang bentuk praktek akuntabilitas dan wujud pengelolaan yang dijalankan oleh Masjid

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pengelolaan keuangan di Masjid Jami' Raudlatul Falah?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di Masjid Jami' Raudlatul Falah ke Umat ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek pengelolaan keuangan di Masjid Jami' Raudlatul Falah.
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangannya di Masjid Jami' Raudlatul Falah kepada Umat.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini terdapat terdapat dua indikator, yaitu :

1. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memperoleh metode pencatatan laporan keuangan Masjid yang mudah dan sesuai yang khususnya tidak menyalahi kaidah agama Islam, karena pencatatan dan pelaporan keuangan sebagai bukti suatu kinerja para pengurus yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan pengurus Masjid dan Masyarakat.

2. Manfaat Empiris

Dengan penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti, karena mengetahui bagaimana sistem pencatatan pengelolaan keuangan Masjid dilakukan oleh para pengurus, dan mengetahui masalah yang dihadapi dalam menjalankan amanah yang diberikan. Selain itu secara tidak

langsung peneliti juga mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dalam perkembangan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam entitas Masjid, sehingga dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas.